

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Djamali, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Depok.
- Abdul Hakim Basyar. (2018). *Relevansi Kualitas Birokrasi dan Manajemen Kinerja*.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Sumatera Barat.
- Afzil Ramadian., dkk. (2021). *Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara*. (n.p.): Ahlimedia Book.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Candra, M., & MH, C. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. Prenada Media.
- Djulaeka, Devi Rahayu. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo. Surabaya.
- Emron Edison Dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Hasan, S., & Santoso, S. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pemerintahan Daerah*.
- Hasibuan, M. S. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hatta Ali. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Ida Martinelli, S. H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*.
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publishing, Malang.
- Kadarisman. (2014). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki, M. (2023). *Penelitian hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Moch Nazir. (2008). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Moekijat. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Muchsan. (2018). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muh. Kadarisman. (2018). *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Muhammad, D. (2018). *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Lhokseumawe. Unimal Press.
- Munasef, Rosdakarya. (2017). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pramusinto, Agus dan Agus Purwanto, Erwan. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Setiyono, Budi. (2012). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Nuansa. Bandung.
- Sigit Hermawan et.al., (2020). *Buku Ajar Perlukah Rotasi dan Promosi Jabatan?*”, Umsida Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. (2018). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Alfabeta.
- Suhadak. (2008). *Kepegawaian Negara*. Diklat Prajabatan. Jakarta.
- Sumarsono, S., & Prasetyo, E. (2021). *Pengaruh Politik dalam Mutasi ASN dan Dampaknya pada Kinerja Pemerintah*.
- Syahya Anggara. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Syamsir Syamsir, Nika Saputra. (2022). *Administrasi Kepegawaian*. (n.p.): CV. Eureka Media Aksara.

Sistem Merit Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Deepublish. Yogyakarta. (2020).

Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Kencana.

Jurnal

19 Mu'Ammar dan Zayn Qadafy. Meritokrasi Perspektif Al-Qur'an. n.d.

Abdul Sabaruddin dan Puji Prio Utomo. Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System di Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. n.d.

Akbar, E. (2013). Analisis Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kantor Walikota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Akhsrullah. (2014). Skripsi: Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Makassar.

Audria dan Hananto Widodo. (2022). Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB NO. 27 Tahun 2021. *Novum: Jurnal Hukum*, 91–100, hlm. 4.

Barus, S. I. (2022). Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).

Bunga Agnita. 2021. Pengaturan Netralitas PNS Sebagai Pegawai ASN Terkait Hak Politik Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- Davit Kristianto. (2023). Implementasi Sistem Informasi Layanan Call Center 110 Di Kepolisian Daerah Bengkulu Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Dewi, A. L., Khayati, S., Yusuf, N. Y., & Kurniawati, W. I. (2023). Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(3), 236-241.
- Dziki Marzuqi. (2018). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Emilya, G. (2022). Analisis Perilaku Birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Camat Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, 2(2).
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 99-115.
- Hasbullah, M. (2024). Implementasi Mutasi dalam Rangka Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional = Implementation of Mutations in the Context of Creating Professional Civil Servants. *Universitas Hasanuddin*.
- Ibnu Khaldun, Budi Setiawati, dan Burhanuddin Burhanuddin. (2022). Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

- Kabupaten Polewali Mandar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(5), 66–78.
- Iqbal Ahmady Fadlan Hidayat, Ubaidullah. (2020). Kebijakan Bupati Terhadap Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5, 1–17.
- M. Akhmad dan A Daud. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompetensi Pegawai dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan dan ..., *Jurnal Magister Manajemen Nobel*, 4(2019).
- Mardiana Hasbullah dan M. Gazali Suyuti. Pelaksanaan Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Moula, S. (2022). Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Pemberhentian PNS di Kabupaten Aceh Barat) (Doctoral dissertation, UIN ArRaniry).
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. (2024). Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Terhadap Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3).
- Paus, S. P., Markus, D. P., & Kirana, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 6(2).

- Prasojo, Eko & Laode Rudita. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1).
- Putra, I., & Purnomowati, R. D. (2025). Hukuman Disiplin Terhadap ASN yang Melakukan Pencaloan CPNS Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
- Sa'diyah, S. J., & Herawati, N. R. (2016). Analisis Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Kepemimpinan Bupati Boyolali Seno Samodro Tahun 2014-2015 (Studi Penelitian Pada Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali).
- Sabaruddin dan Utomo. Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System di Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Saleh, K. A. (2017). Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Politik Desentralisasi. *Ilmu dan Budaya*, 40(55).
- Salma Haqq. (2018). Kajian Terhadap Penolakan Perpanjangan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis Dihubungkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Fakultas Hukum Unpas*.
- Stephen Bernard. Castilla, Emilio J., Castilla, Emilio J., dan Stephen Benard. (2010). The Paradox of Meritocracy in Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 55(4), 543–76.

- Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9).
- Supriyadi, S. (2022). Analisis putusan Ptun Jakarta nomor. 82/G/2020/PTUN-JKT dalam Sengketa Tata Usaha Negara Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Syaloom Novelya Caren Sindar. (2024). Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Pemberian Mutasi Aparatur Sipil Negara. *Lex Crimen*, 12(5).
- Tri Raharjanto. (2019). Systematic Literature Reviews: Sistem Merit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*.
- Wahyuni, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 11(1), 69-88.
- Wan Fira Aulia Putri. (2020). Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapenda Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Universitas Lancang Kuning.
- Yulia Putri. (2019). Konsep Kewenangan Kepala Daerah dalam Melakukan Mutasi PNS. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN

PERMENDAGRI Nomor 820/6040/SJ Tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri

WEBSITE

“Mutasi 13 Pejabat Ini Yang Buat ASN Jember Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Faida Baca Artikel Detiknews, ‘Mutasi 13 Pejabat Ini Yang Buat ASN Jember Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Faida’ Selengkapnya <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/d-5315339/Mutasi-13>,” detik news, n.d. diakses pada 10 November 2024, Pukul 14:39 WIB.

“Mutasi 13 Pejabat Ini Yang Buat ASN Jember Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Faida Baca Artikel Detiknews, ‘Mutasi 13 Pejabat Ini Yang Buat ASN Jember Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Faida’ Selengkapnya <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/d-5315339/Mutasi-13>,” detik news, n.d. diakses pada 10 November 2024, Pukul 14:39 WIB.